

Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non-Tempur di Iraq Tahun 2004-2008

Ferri Devyanto – 070912082

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Since World War II, Japan became the state that professes the pasifism paradigm. Pasifism prohibit Japan to use military instruments in order to international disputes settlement, except for self-defense aims. But, at 2003, Japanese government made policy to deploy military abroad to Iraq, in order to execute non-combatant mission for humanitarian aid and infrastructure reconstruction assistances. The research question of this research is why Japan made a policy to deploy troops to Iraq in order to assists United States-led occupation operations. The theoretical framework that used to explain that is the theory about alliance dilemma. Alliance dilemma theory explain that the military alliance obligation generate dilemma for pasifist state. It's difficult for keep the commitment inside alliance. Hypothesis on this research is that the Japan's policy to deployed troops to Iraq was the respons of Japan to manage the alliance dilemma and also consolidate the alliance with United States for face regional instability which happened.

Keywords: *Japanese Military, non-combatant, security dilemma, alliance dilemma, 2003 Iraq War.*

Sejak Perang Dunia II, Jepang menjadi negara yang menganut prinsip pasifisme yang melarang Jepang menggunakan instrumen militer untuk menyelesaikan sengketa internasional, selain untuk pertahanan diri. Namun, pada tahun 2003, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menerjunkan militer ke luar negeri, yaitu ke Iraq guna melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur. Mengapa Jepang mengambil kebijakan mengirimkan pasukan ke Iraq? Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawabnya adalah adalah teori mengenai dilema aliansi. Teori ini menjelaskan mengenai kompleksitas bagi negara untuk menjaga komitmen dalam aliansi. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Jepang mengalami dilema aliansi. Kebijakan mengirim militer ke Iraq merupakan respon Jepang untuk mengatasi dilema ini dan memperkuat komitmen Amerika Serikat dalam aliansi guna menghadapi instabilitas kawasan regional.

Kata-Kata Kunci: *Militer Jepang, Non-Tempur, Dilema Keamanan, Dilema Aliansi, Perang Iraq 2003.*

Sebuah tonggak sejarah bagi militer Jepang terjadi pada momentum Perang Iraq yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Jepang mengirimkan pasukan militernya ke Iraq guna melaksanakan misi non-tempur. Misi militer Jepang di Iraq adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan rekonstruksi. Bagi Jepang, penerjunan misi ke Iraq ini merupakan kali pertama bagi militer mereka untuk diturunkan di luar negeri, di luar misi PBB. Selain itu ini juga untuk pertama kali bagi militer Jepang dikirimkan dibawah bendera aliansi. Dalam operasi yang dilakukan oleh militer Jepang di Iraq ini, tercatat sejumlah 5.500 personel militer diturunkan dalam misi ini. Jumlah ini merupakan jumlah pasukan yang terbanyak diturunkan oleh Jepang dalam misi luar negeri sejak tahun 1992.

Sebelumnya, sejak 1992 sebenarnya Jepang telah aktif mengirimkan militernya untuk melaksanakan misi-misi di luar negeri. Namun penerjunan militer di Iraq pada tahun 2004-2008 ini berbeda dengan tradisi pengiriman pasukan ke luar negeri yang telah dilakukan Jepang sejak tahun 1992 lalu. Dari lima belas misi yang dilakukan militer Jepang sejak tahun 1992 lalu, empat misi dilakukan di daerah konflik, namun hal itu pun dilakukan dibawah bendera PBB. sembilan misi di luar bendera PBB dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan, atas permintaan negara yang bersangkutan. Sedangkan dua misi dilakukan di luar PBB dan bukan atas permintaan negara bersangkutan, namun dilakukan bukan di daerah konflik (misi di lautan). Misi di Iraq menjadi misi pertama diterjunkannya militer Jepang ke daerah *active war zone* yang belum mengalami gencatan senjata.¹

Tugas dari JSDFIRSG di Iraq ini bertumpu pada tiga aktivitas, yaitu: 1) menyalurkan bantuan medis, 2) pendistribusian air, 3) rehabilitasi dan pemeliharaan penggunaan infrastruktur, serta 4) melakukan transportasi material yang diperlukan untuk rekonstruksi. Selain misi-misi utama tersebut, militer non-tempur Jepang juga melakukan aktivitas dukungan lainnya untuk memberikan bantuan guna menjamin keamanan di Iraq.² Operasi JSDFIRSG berlangsung selama kurang lebih empat tahun. Diantara empat tahun tersebut, dua tahun tiga bulan dilakukan aktivitas bantuan kemanusiaan secara langsung di Iraq oleh GSDF, dan juga empat tahun secara tidak langsung oleh ASDF dan MSDF. Pemerintah Jepang merilis klaim bahwa selama empat tahun Jepang telah melakukan 821 misi kemanusiaan, di dalamnya termasuk menyalurkan 673 ton barang dan bahan-bahan bantuan kemanusiaan.³

¹ Asahi Shimbun, *Koizumi commits SDF personnel to Iraq*. <http://www.asahi.com/english/politics/TKY200312100160.html>. (2003). Diakses 20/11/13.

² Pernyataan PM Jepang Junichiro Koizumi pada 9/12/2003. http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/issue2003/pmstate0312.html

³ Part III Measures for Defense of Japan. Chapter 3 Improvement of the International Security Environment

Hal tersebut kemudian menarik untuk diteliti. Hal apakah yang kemudian melatar belakangi keputusan pemerintah Jepang untuk melakukan hal tersebut. Dari fakta yang didapat dari hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Mengapa kemudian pada tahun 2004 Jepang melakukan kebijakan yang diluar tradisi sejak 1992, dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan militernya ke Iraq dan Kuwait di bawah koordinasi dengan aliansi dengan Amerika Serikat. Hal ini berarti untuk pertama kalinya bagi Jepang berkontribusi secara militer kepada Amerika Serikat dibawah aliansi di luar negeri. Untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang latar belakangi kebijakan Jepang mengirim pasukan ke Iraq, penelitian ini lebih melihat kebijakan tersebut dikeluarkan karena terkait pada faktor aliansi militer Jepang dengan Amerika Serikat.

Kerangka pemikiran yang coba dibangun dalam penelitian ini mencoba mengaitkan kebijakan Jepang dengan perilaku sebuah negara di dalam sebuah aliansi dengan negara lain. Pengertian dari aliansi adalah suatu bentuk asosiasi formal diantara negara-negara untuk menggunakan (atau tidak menggunakan) kekuatan militer dalam situasi kondisi tertentu, melawan negara diluar keanggotaan aliansi mereka. Pada dasarnya aliansi menawarkan negara peluang untuk meningkatkan keamanan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha individual. Dua hal yang akan mendorong negara untuk menjalin aliansi adalah dorongan idealisme (kesamaan ide) dan juga realitisme (pertimbangan biaya dan keuntungan).⁴

Menurut David Hendrickson, aliansi merupakan suatu alat untuk mengelola keamanan internasional. Asumsinya adalah negara-negara membentuk suatu perkumpulan berbasiskan keanggotaan, yang mana tiap-tiap anggota akan mendapat hak dan kewajiban. Logika dari aliansi ini bukanlah untuk menciptakan situasi *balance of power*, namun untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar untuk melawan aktor yang berpotensi melanggar hukum.⁵ Kajsja Oest menghubungkan aliansi dengan perilaku dan komitmen dari suatu negara. Menurutnya, ikatan aliansi yang sifatnya formal akan membentuk suatu komitmen dari masing-masing pihak, yaitu merujuk pada tingkat dan bentuk komitmen dalam kerjasama pertahanan. Dalam pandangan Oest, komitmen menjadi hal yang cukup vital dalam bentukan aliansi ini. Ia menggunakan parameter komitmen guna mengukur karakteristik tipologi dari suatu aliansi. Semakin tinggi derajat aliانسinya, maka tingkat komitmen diantara negara-negara yang beraliansi tersebut akan

⁴ Bruno Tertrais, *The Changing Nature of Military Alliances* dalam *The Washington Quarterly*. Washington: The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, 2004, P 136.

⁵ David Hendrickson, *Ethics of Collective Security*. Carnegie: Ethics & International Affairs, 1993, P. 4.

semakin tinggi juga. Oest bahkan menganalogikan hubungan aliansi ini dengan hubungan percintaan. Dalam hubungan percintaan komitmen menjadi suatu hal yang sangat penting. Aliansi pertahanan merupakan tingkatan tertinggi dalam suatu aliansi. Persamaannya dengan hubungan percintaan bagi aliansi pertahanan adalah pernikahan. Karakteristik yang dapat dilihat dari pernikahan adalah: 1) Komitmen yang tinggi, 2) Mutual, dan 3) Formal.⁶

Dalam konteks kasus Jepang ini, komitmen yang ideal ini kemudian memunculkan suatu hal yang kompleks. Hal ini kemudian memunculkan suatu dilema bagi Jepang sendiri, dilema ini dapat disebut sebagai suatu situasi dilema aliansi. Dilema aliansi adalah suatu kiasan untuk merujuk bagaimana sulit dan kompleksnya bagi dua atau lebih negara dalam mengelola sebuah aliansi militer. Ada suatu pilihan yang dihadapi negara atau pemain, “bekerja sama” atau “mengingkar”. Idealnya, setiap anggota aliansi saling memberikan dukungan penuh kepada anggota aliansi lainnya. Namun hal seperti ini biasanya tidak selalu terjadi. Karena dukungan militer secara penuh tentunya akan menghabiskan dana yang begitu besar apabila dukungan itu terus dilakukan. Dalam prakteknya, terkadang memberikan bantuan finansial menjadi pilihan yang lebih bijak untuk dilakukan dalam mendukung aliansi.⁷

Tuntutan akan komitmen dalam aliansi menciptakan tekanan untuk terlibat dalam kebijakan negara aliansi, namun faktor domestik menentang negara terlibat dalam kebijakan tersebut. Menurut Boyer, di negara dimana terdapat penentangan domestik yang kuat, namun bersamaan ada komitmen solidaritas yang sama kuat, kebijakan yang berhubungan dengan aliansi biasanya tarik-menarik antara kontribusi ekonomis (bantuan luar negeri atau konsesi perdagangan) dengan kontribusi politis (menerima penerjunan militer menghadapi tekanan internasional).⁸ Status aliansi militer memunculkan suatu ekspektasi atas komitmen. Bentuk komitmen yang diharapkan oleh negara adalah dukungan dan bantuan yang total dari rekan aliansi. Namun, karena berbagai pertimbangan, tidak ada jaminan dari suatu negara untuk dapat selalu memenuhi ekspektasi. Dilema aliansi akan terjadi apabila ketika suatu negara tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut.

⁶ Kajsja Oest, *The End of Alliance Theory?*, Copenhagen: Institut for Statskundskab Københavns Universitet, 2007

⁷ Tomoki Furukawazono et al, *Iterated Prisoner's Dilemma on Alliance Networks*, Keio University (n.d).

⁸ Daisaku Sakaguchi, *Specialization in the Alliance - Military and Non-military Contributions in the U.S.-Japan Alliance -*, The Henry L. Stimson Center, 2004, p. 5

Faktor yang memicu Dilema Keamanan Jepang

Situasi internasional dan regional menjadi latar belakang yang mendorong Jepang mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan pasukannya ke Iraq. Kondisi yang dialami Jepang cukup kompleks pada pertengahan 1990an hingga awal 2000an. Setidaknya, ada 3 isu pertahanan yang sedang dihadapi oleh Jepang pada saat itu, yaitu: 1) Manuver Politik dan Militer Korea Utara, 2) Modernisasi Militer dan Ekspansi Maritim China, 3) Ketegangan dan Sengketa Teritorial dengan Korea Selatan dan Russia. Instabilitas yang paling mengancam dan paling dikhawatirkan oleh Jepang adalah manuver politik dan militer yang dilakukan oleh Korea Utara sejak 1998. Korea Utara sering melakukan provokasi-provokasi dengan menggunakan senjata nuklir dan misil balistik yang mereka miliki. Sejak keluar dari perjanjian *Nuclear Non-proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1993, Pyongyang semakin agresif memperlihatkan kapabilitas militer mereka yang mampu mengembangkan dan menggunakan persenjataan nuklir dan misil balistik.

Kemudian ancaman berikutnya adalah ancaman ekspansi militer yang dilakukan oleh Republik Rakyat China (RRC). Setelah China melakukan modernisasi militernya pada tahun 1989, kebijakan China kemudian cenderung lebih ekspansionis. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1989 hingga tahun 2003, belanja negara untuk kebutuhan militer dan pertahanan China selalu meningkat dari tahun ke tahun. China banyak melakukan perubahan dalam militernya, baik secara struktur, sumber daya pasukan dan juga persenjataannya. Kebijakan ekspansionis yang dilakukan China berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan juga kebijakan pertahanan, terutama berkaitan dengan zona maritim. Salah satu bentuk ekspansi maritim China adalah persengketaan dengan Jepang terkait kepemilikan kepulauan Senkaku.⁹

Problem kawasan lainnya yang juga turut memunculkan dilema keamanan dari Jepang adalah ketegangan dan sengketa teritorial dengan Korea Selatan dan Russia. Hubungan dengan Korea Selatan, yang notabene merupakan negara yang terdekat dengan Jepang dalam aspek politis pun, juga mengalami fluktuasi. Salah satu sengketa antara Jepang dan Korea Selatan terkait soal teritorial. Kedua negara masing-masing mengklaim kepemilikan atas pulau Takeshima/Dokdo.¹⁰

⁹ Oleh China dinamai kepulauan Diaoyutai, terletak di Laut Cina Timur yang terdiri atas 8 pulau kecil dengan total luas wilayah seluas 6,3 km².

¹⁰ Jepang menamakannya pulau Takeshima, sedangkan Korea Selatan menamakannya pulau Dokdo. Merupakan sekelompok pulau kecil di perairan Laut Jepang di sebelah timur Semenanjung Korea, di utara, Prefektur Shimane, Chugoku, terbagi atas 2 buah pulau besar dan 35 pulau yang lebih kecil. Total luas wilayah ini adalah 0,18745 km²

Sengketa kedua negara pernah sempat menyebabkan ancaman-ancaman dari pihak Korea Selatan.¹¹ Selain itu, sengketa teritorial juga dialami Jepang dengan Rusia. Sengketa dengan Rusia ini dikenal sebagai *Northern Territories dispute*, karena Jepang mengklaim kepulauan Kurile sebagai wilayah utara dari Jepang (*Hoppō Ryōdo*). Sama sekali belum ada hasil perjanjian damai diantara kedua belah pihak.¹²

Situasi instabilitas kawasan yang seperti itu menempatkan Jepang ke dalam kondisi dilema keamanan. Kondisi dilema keamanan menyadarkan pemerintah Jepang akan pentingnya peran aliansi Amerika Serikat untuk menjamin keamanan dan pertahanan Jepang. Fakta statistik menunjukkan bahwa kekuatan *manpower* dan alutsista Jepang tidak berimbang dibandingkan dengan *manpower* dan alutsista dari negara tetangga di Asia Timur. Di saat yang bersamaan, Jepang mendapati Amerika Serikat sibuk dengan urusan kebijakan *war on terror*.

Dilema keamanan Jepang menjadi semakin kompleks ketika di sisi lain, Prinsip pasifisme yang dianut oleh Jepang berimplikasi bagi pertahanan Jepang. Implikasi yang paling dapat dilihat adalah terhadap postur militer Jepang, Militer Jepang dibatasi pengembangannya. Postur militer Jepang lebih dikembangkan untuk keperluan pertahanan (*self-defense oriented*), dan tidak boleh dikembangkan ke arah agresi (*agression oriented*). Tugas untuk menjaga pertahanan Jepang, di bebaskan kepada Japan Self-Defense Force (JSDF).¹³ Hal ini diatur dalam pasal 83 UU *Self-Defense Forces* Jepang, yang menyatakan bahwa tugas militer Jepang adalah terkait dengan ancaman internal dan juga bencana alam. Militer Jepang terbagi ke dalam tiga matra, yaitu: Angkatan Darat (*Ground Self-Defense Force*), Angkatan Udara (*Air Self-Defense Force*), dan juga Angkatan Maritim (*Maritime Self-Defense Force*). Tiga fungsi utama militer Jepang adalah: 1) Memberikan bantuan perlindungan terhadap ancaman keamanan dalam negeri yang tak terduga (serangan teroris) dan ancaman bencana alam. 2) menghadapi invasi terhadap Jepang. 3) Mendorong terciptanya perdamaian dunia.¹⁴ Pada tahun 2003 jumlah personel dari militer Jepang kurang lebih sekitar 240.000 personel. Jumlah 240.000

¹¹ Nitin Philip, *The General Assembly : Dokdo/ Takeshima Islands Dispute (Japan – S. Korea)*, 2013, P. 5

¹² Donald Skinner & Richard Tanter, *About Face: Japan's remilitarization*, 2006, P. 22. Diakses 11/12/13.

¹³ Nama resminya dalam bahasa Jepang 自衛隊 (*Jieitai*). Tai (隊) dalam bahasa Jepang berarti kelompok, JSDF dianggap suatu kelompok, bukan militer. Anggota Jieitai disebut sebagai *Jieitaiin* (自衛隊員), in (員) berarti anggota. Jadi, dalam pemahaman Jepang anggota Jieitai bukan dianggap prajurit, mereka dianggap sebagai masyarakat sipil yang bergabung dalam pasukan bela diri Jepang.

¹⁴ Roland Dolan & Robert Worden, *Japan: A Country Study*, Washington: Library at Congress, 1990.

personel sebenarnya dapat dikatakan kurang berimbang apabila dibandingkan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara tetangga di regional Asia Timur.

Militer Jepang merupakan militer dengan jumlah personel aktif paling sedikit di kawasan regional Asia Timur. Pengembangan dan kepemilikan alutsista militer Jepang pun juga dibatasi. Militer Jepang tidak diperbolehkan memiliki alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tergolong persenjataan serang (*offensive weaponry*), seperti halnya: kapal selam nuklir dan juga kapal induk.¹⁵ Jenis *offensive weaponry* lain yang tidak boleh dimiliki dan dikembangkan oleh Jepang adalah *bomber*, *cruiser*, *misil balistik*, dan juga *armed drones*^{16,17} Selain itu Jepang juga tidak dapat terlibat dalam produksi dan pengadaan atas berbagai macam rudal jelajah dan pembom strategis, dan juga persenjataan yang mampu digunakan untuk melakukan serangan besar-besaran.¹⁸ Hal ini kemudian berimplikasi terhadap ketergantungan Jepang terhadap aliansi dengan Amerika Serikat. Menurut data tahun 2004, setidaknya sekitar 50.000 personel militer ditempatkan oleh Amerika Serikat di beberapa basis militer di daratan Jepang. Ditambah lagi sekitar 14.000 personel Angkatan Laut Amerika Serikat yang juga disiagakan di wilayah perairan Jepang. Mayoritas ditempatkan di kepulauan Okinawa.¹⁹ Jepang juga tidak diperbolehkan menjalin kerjasama militer selain dengan Amerika Serikat.²⁰

Dalam praktiknya, aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat didasarkan pada sebuah pedoman (*guideline*). Panduan ini juga memberikan kerangka umum serta arah kebijakan, pembagian peran, dan misi dari masing-masing negara. Termasuk juga cara-cara kerja

¹⁵ Teslik, Lee Hudson, *Japan and Its Military*, (2006). <http://www.cfr.org/japan/japan-its-military/p10439#p5>. Diakses 1/12/2013.

¹⁶ Kirk Spitzer, Japan Looks to Add Offensive Firepower, 2013. <http://nation.time.com/2013/06/03/japan-looks-to-add-offensive-capability/>. Diakses 3/12/2013.

¹⁷ *Bomber Aircraft* (pesawat pembom) adalah pesawat tempur yang di desain untuk melakukan menyerang target di darat dan laut dengan cara menjatuhkan bom, menjatuhkan torpedo, dan juga meluncurkan misil. *Cruiser Aircraft* adalah kelas kapal perang dengan ukuran yang lebih kecil dari kapal perang kelas *battleship* namun lebih besar dari kapal perang *destroyer*. Misil adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari sasaran atau menyesuaikan arah. Misil balistik adalah misil dengan jarak jangkauan antar benua. (http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_04a.htm). *Armed Drones* atau dikenal juga *Unmanned aerial vehicles* (UAV) adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh pilot dari darat atau dengan program. Memiliki kemampuan mata-mata dan juga kemampuan pembom.

¹⁸ 2013, Japan's self-defense forces get into samurai spirit, http://english.pravda.ru/world/asia/06-06-2013/124771-japan_self_defense_forces-0/. Diakses 2/12/2013.

¹⁹ Lee Hudson Teslik, *Japan and Its Military*, (2006), <http://www.cfr.org/japan/japan-its-military/p10439#p5>. Diakses 11/12/2013.

²⁰ Peter Ford, *Will rising tensions in Asia push Japan toward a full-fledged military?*, (2013). <http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2013/0221/Will-rising-tensions-in-Asia-push-Japan-toward-a-full-fledged-military>. Diakses 31/12/13.

sama dan koordinasi, baik dalam keadaan normal dan selama. Dalam *guideline* tahun 1997, Jepang memiliki peranan yang lebih besar dalam mempertahankan diri. Jika pada *guideline* tahun 1978, militer Jepang hanya ditugaskan untuk beraktivitas pada wilayah *homeland* saja, maka pada *guideline* tahun 1997, wilayah aktivitas militer Jepang diperluas untuk dapat beraktivitas di wilayah sekeliling (*surrounding areas*).²¹ Seluruh aspek keamanan konvensional dari Jepang menjadi tanggung jawab Pasukan Beladiri Jepang (JSDF). Baik ancaman-ancaman dari udara, dari laut, invasi darat, maupun serangan-serangan tidak konvensional. Amerika Serikat hanya memberikan dukungan dan *backup* saja. Peranan tugasnya hanya dalam bentuk dukungan guna meningkatkan kapabilitas militer Jepang.²² Namun hanya ada satu aspek yang masih menjadi tanggung jawab bagi militer Amerika Serikat dalam menjaga keamanan Jepang. Aspek tersebut adalah untuk menghadapi serangan misil balistik. Dalam menghadapi serangan misil balistik, Amerika Serikat berkewajiban untuk memberikan data-data intelijen berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga berkewajiban untuk memberikan bantuan kekuatan serang balik menghadapi ancaman serangan misil balistik.

Dilema Aliansi yang Dialami Jepang

Di dalam kondisi dilema keamanan yang dialami Jepang, mereka menyadari betul mengenai pentingnya aliansi dengan Amerika Serikat. Namun pada waktu yang bersamaan, momentum WoT dan Perang Iraq kemudian memunculkan suatu dilema aliansi bagi Jepang. Di satu sisi, masyarakat Jepang takut apabila mereka harus terlibat dalam perang Amerika Serikat dan akan melanggar prinsip pasifisme. Tapi di sisi lain, dalam pemerintah Jepang ada suatu ketakutan jika Amerika Serikat akan menghentikan aliansi apabila mereka tidak berkontribusi secara militer.²³ Di satu sisi Jepang mendapat tekanan untuk mendukung kebijakan pertahanan global dari Amerika Serikat, dalam kaitannya sebagai partner aliansi. Namun di sisi lain Jepang mendapat hambatan, dan tidak bisa secara bebas mendukung kebijakan Amerika Serikat. Di satu sisi, Jepang mendapat tekanan untuk berkontribusi dalam kebijakan *war on terror* Amerika Serikat. Tekanan berasal dari dalam diri Jepang sendiri dan juga sedikit dari Amerika Serikat. Di Jepang sendiri ada suatu pandangan tekanan di dalam aliansi dengan Amerika Serikat, yaitu pandangan *gaiatsu* merujuk pada tekanan eksternal dari

²¹ Beina Xu, *The U.S.-Japan Security Alliance*, <http://www.cfr.org/japan/us-japan-security-alliance/p31437#p2>, (2013). Diakses 15/12/2013

²² Yamaguchi Noboru, *Redefining the Japan-US Alliance*, (2011). <http://www.nippon.com/en/features/coo204/>. Diakses 15/12/2013

²³ Daisaku Sakiguchi, *Specialization in the Alliance - Military and Non-military Contributions in the U.S.-Japan Alliance* -, The Henry L. Stimson Center, (2004), p. 5.

luar bagi yang berupa permintaan kepada Jepang untuk melakukan emansipasi militernya. Tekanan yang dimaksud berasal dari Amerika Serikat. Emansipasi militer yang dimaksud adalah Jepang agar meningkatkan pembagian beban (*burden-sharing*) dan juga memperbesar peran militer Jepang dalam aliansi dan kerjasama militer internasional, termasuk menerjunkan militernya untuk berkontribusi baik dalam *United Nations Peace Keeping Operations* (UN PKO) maupun dalam aliansi.²⁴

Selain pandangan *gaiatsu*, Jepang juga memiliki memori buruk dalam aliansinya dengan Amerika Serikat pada momen Perang Teluk 1991, yang disebut sebagai “Sindrom Perang Teluk Jepang”. Sindrom ini merujuk pada hasil voting dari parlemen Amerika Serikat (*House of Representatives*) September 1990. Ketika itu, mayoritas suara parlemen Amerika Serikat setuju agar Amerika Serikat menarik militernya dari wilayah Jepang. Parlemen Amerika Serikat menganggap bahwa Jepang tidak serius dan tidak berkomitmen dalam beraliansi. Jepang dianggap enggan untuk berkontribusi terhadap karena Jepang terlalu pelit untuk memberikan dukungan secara militer.²⁵ Respon Jepang dalam Perang Teluk, dilihat sebagai kebijakan yang enggan untuk berkontribusi dalam tindakan militer yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Sebagai alternatifnya mereka lebih memilih untuk berkontribusi secara finansial. Hal tersebut kemudian membuat Jepang mendapat kritik dari dunia internasional dan yang paling keras dari Amerika Serikat, karena dianggap menghindari tanggung jawab secara langsung.²⁶

Di sisi lain, Jepang memiliki keterbatasan-keterbatasan, yang menghambat mereka untuk berkontribusi. Hambatan tersebut datang dari dalam negeri, yaitu prinsip pasifisme, baik secara konstitusional maupun dari masyarakat dan elit Jepang sendiri. Fujiwara menganalogikan Jepang sebagai pecandu pasifisme. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat Jepang seakan “kecanduan” terhadap prinsip pasifisme ini.²⁷ Akihiko Kimijima menjelaskan bahwa ada dua pandangan dari masyarakat Jepang dalam melihat peranan Jepang berkaitan dengan pasifisme Jepang ini. Pertama, masyarakat Jepang menyadari betul bahwa pentingnya peranan militer Jepang dan juga pentingnya aliansi dengan Amerika Serikat dalam konteks pertahanan Jepang. Bagi mereka menerima bahwa Jepang mengembangkan militer mereka, namun mereka mencegah militer mereka untuk tidak diterjunkan di luar negeri untuk tujuan agresif. Di Jepang sendiri ada pandangan yang memisahkan paradigma politik elit Jepang dalam

²⁴ Aurelia G. Mulgan, *Japan's Defence Dilemma*. Security Challenge vol 1, (2005), p 59.

²⁵ Jack E. Holden, , *What factors influenced Japan's decision to dispatch its Self-Defence Forces (SDF) to Iraq in 2004?*, Dalam POLIS Journal Vol 6, Leeds: University of Leeds, (2011), hlm 16.

²⁶ Amy L Catallinac, (2007), p 63.

²⁷ Kevin Cooney, (2002).

melihat wacana re-militerisasi. Di satu sisi ada pandangan elit yang ingin membangun kembali militer Jepang untuk menjadi “negara normal”, pandangan ini disebut sebagai pandangan *hawkish*²⁸. Pandangan ini disebut sebagai pandangan yang tidak atau kurang memahami sejarah Jepang. Sedangkan di sisi seberang lain, para politisi yang lebih tua, mereka sebagian mengalami sejarah Perang Dunia II, berpandangan untuk menolak re-militerisme Jepang.²⁹ Sebagian besar masyarakat Jepang bersikap apatis terhadap wacana re-militerisasi Jepang. Menurut Kawashima (2005), bahkan masyarakat Jepang membutuhkan waktu setengah abad untuk dapat memberikan legitimasi terhadap militer Jepang (*Self Defense Forces*) sejak pertama kali terbentuk pada tahun 1950. Ada rasa keengganan tentatif bahkan di dalam unsur-unsur masyarakat Jepang sendiri untuk meninjau posisi militer Jepang.³⁰ Begitu kuatnya masyarakat Jepang memegang prinsip pasifisme ini dapat dilihat ketika saat terjadi beberapa penolakan dalam pembahasan Undang-undang penerjunan militer Jepang ke Iraq di parlemen. Banyak kontroversi yang mengiringi proses tersebut. Di dalam parlemen, dilakukan dengan cara memboikot sidang untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah Jepang.

Selain itu hambatan datang dari negara tetangga di kawasan regional Asia Timur yang masih memendam trauma terhadap militer Jepang. Trauma ini menimbulkan sentimen-sentimen negara-negara sekitar. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi masalah di Asia Timur, yaitu: masalah sejarah, faktor-faktor ideologis dan sengketa teritorial.³¹ Ketakutan akan re-militerisasi Jepang berakar dari warisan sejarah Perang Dunia II. Memori tentang keberingasan militerisme Jepang dalam Perang Asia Pasifik pada tahun 1941-1945 masih membayangi negara-negara Asia Pasifik. Traumatisme ini kemudian menumbuhkan suatu kecurigaan yang sangat mendalam pada isu militer Jepang.³² Memori buruk dari China dan Korea tersebut tergambar ketika masyarakat-masyarakat dari kedua negara tersebut merespon beberapa isu, diantaranya adalah isu kunjungan resmi kenegaraan yang dilakukan oleh beberapa perdana menteri Jepang, termasuk PM Junichiro Koizumi, pada tahun 2005 lalu ke kuil Yasukuni dan juga isu mengenai

²⁸ Politisi nasionalis sayap kanan atau neokonservatif Jepang. Dikenal juga dengan sebutan *neo-defense school*. Politisi yang digolongkan *hawkish* adalah politisi yang mayoritas lahir pada masa pasca Perang Dunia II. Mereka menginginkan agar militer Jepang lebih berperan aktif.

²⁹ Thomas J Christensen, *China, the US-Japan Alliance, and The Security Dilemma in East Asia*, dalam *International Security* vol 23 no 4, (1999), p 52-57.

³⁰ Jack E. Holden, (2011), p 8.

³¹ Chen Jimin, Solving the Northeast Asia Security Dilemma, (2013). <http://thediplomat.com/2013/05/solving-the-northeast-asia-security-dilemma/>. diakses 11/12/2013.

³² Thomas J Christensen, (1999), p 52-57.

buku teks sejarah Jepang. Bagi masyarakat Korea dan China, kunjungan kenegaraan resmi ke kuil Yasukuni dipandang sebagai suatu simbol penghormatan terhadap militerisme Jepang.³³ Dua hal tersebut, kontroversi kunjungan ke kuil Yasukuni dan kontroversi buku teks sejarah, menimbulkan reaksi-reaksi negatif di negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang, terutama Korea dan China. Kontroversi tersebut menimbulkan gelombang-gelombang protes dan juga kegeraman dari warga Korea dan China. Bahkan juga sempat beberapa kali mempengaruhi hubungan diplomatik. Sentimen regional ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Jepang untuk tidak memicu respon negatif jika Jepang melakukan kebijakan yang menyangkut remiliterasi. Respon negatif dari China dan Korea Selatan pasti akan berimplikasi buruk pada hubungan diantara Jepang dan kedua negara tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan berdampak juga pada hubungan secara keseluruhan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Jepang tidak ingin dianggap sebagai “*free rider*” di dalam aliansi, karena hal tersebut akan berdampak buruk pada komitmen Amerika Serikat di dalam aliansi. Oleh karena itu, Jepang berkepentingan untuk dapat berkontribusi dalam WoT. Momentum bagi Jepang untuk berkontribusi didapat pada operasi okupasi Iraq oleh Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan operasi militer Amerika Serikat di Iraq direstui dan terotorisasi oleh PBB. Jadi secara hukum internasional, bukan suatu hal yang ilegal ketika Jepang turut berkontribusi dalam operasi tersebut. Jepang mengirim pasukan dengan kualifikasi non-tempur guna melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan bantuan rekonstruksi infrastruktur. Jepang mampu mengemas kontribusi militer Jepang, namun dengan tidak menimbulkan suatu reaksi dan respon yang negatif dari domestik maupun regional.

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa didapat adalah bahwa kebijakan Jepang untuk mengirim pasukan militer ke Iraq guna menjalankan misi non-tempur merupakan strategi dari Jepang untuk memelihara kelangsungan aliansi dengan Amerika Serikat. Apapun kontribusi yang dilakukan oleh Jepang

³³ Kuil Yasukuni adalah kuil Shinto yang terletak di Tokyo. Dibangun pada 1934 silam dan dinobatkan sebagai simbol agresi Jepang. Terdapat “buku jiwa” di dalam kuil itu yang berisikan nama-nama tentara Jepang dan lokasi jajahannya (Korea dan Taiwan). Kuil ini merupakan kuil peringatan bagi pahlawan dan orang yang tewas dalam melayani negara Jepang, diantaranya yang disemayamkan di sana adalah prajurit, perawat, pelajar yang terlibat dalam petempuran maupun yang bunuh diri akibat malu atas kekalahan dalam Perang Dunia II. Abu jasad mereka di simpan di sana secara rahasia pada tahun 1978. Diantara pahlawan Jepang yang disemayamkan di sana, juga termasuk empat belas kriminal kelas A dan seribu kelas B dan C. Termasuk mantan PM Jepang Hideki Tojo yang dieksekusi sebagai penjahat perang tahun 1948.

kepada militer Amerika Serikat, namun esensi dari aliansi militer adalah bantuan yang bersifat militer. Berapapun bantuan rekonstruksi dalam bentuk *Official Development Assistance* (ODA), namun bantuan yang akan terlihat tentunya adalah bantuan berbentuk kontribusi militer secara langsung. Pemerintahan Jepang di bawah PM Junichiro Koizumi memiliki kejelian dan kebijaksanaan dalam melihat kondisi keamanan Jepang dan juga momentum operasi militer Amerika Serikat di Iraq dalam *war on terror* ini. Jeli karena mereka dapat melihat kesempatan di dalam momentum tersebut dan kemudian memanfaatkannya guna melakukan konsolidasi. Namun di sisi lain mereka juga memiliki suatu kebijaksanaan dalam memanfaatkan peluang tersebut. Jepang mampu memberikan bantuan militer tanpa memicu respon negatif yang berlebihan, baik dari dalam negeri, maupun dari negara tetangga di kawasan regional.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Catallinac, Amy L. *Identity Theory and Foreign Policy: Explaining Japan's Responses to the 1991 Gulf War and the 2003 U.S. War in Iraq*, dalam *Politics & Policy* Vol 35 No 1. Blackwell Publishing Inc, 2007
- Christensen, Thomas J. *China, the US-Japan Alliance, and The Security Dilemma in East Asia*, dalam *International Security* vol 23 no 4, 1999
- Cooney, Kevin. *Japan's Foreign Policy Maturation: A Quest for Normalcy*. London: Routledge, 2002
- Doland, Roland & Robert Worden. *Japan: a Country Study*. Washington: Library at Congress, 1990
- Furukawazono, T., Takada, Y., Iba, T. *Iterated Prisoner's Dilemma on Alliance Networks*. Tokyo: Keio University, (n.d).
- Hendrickson, David. *Ethics of Collective Security*. Carniege: Ethics & International Affairs, 1993
- Holden, Jack E. *What factors influenced Japan's decision to dispatch its Self-Defence Forces (SDF) to Iraq in 2004?* Dalam *POLIS Journal* Vol 6. Leeds: University of Leeds, 2011
- Japan Ministry of Defense. Part III Measures for Defense of Japan. Chapter 3 Improvement of the International Security Environment, (n.d).
- Mulgan, Aurelia G. *Japan's Defence Dilemma*. Security Challenge vol 1, 2005
- Philip, Nitin. *The General Assembly : Dokdo/ Takeshima Islands Dispute (Japan – S. Korea)*, 2013

- Oest, Kajsa. *The End of Alliance Theory?*. Copenhagen: Institut for Statskundskab Københavns Universitet, 2007
- Sakaguchi, Daisaku. *Specialization in the Alliance - Military and Non-military Contributions in the U.S.-Japan Alliance -*. The Henry L. Stimson Center. 2004
- Skinner, Donald and Tanter, Richard. *About Face: Japan's remilitarization*. CLSAU, 2006
- Snyder, Craig A. *Contemporary Security and Strategy*. Palgrave: Macmillan, 2008
- Tertrais, Bruno. *The Changing Nature of Military Alliances* dalam *The Washington Quarterly*. Washington: The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, 2004

Artikel Online

- Asahi Shimbun, *Koizumi commits SDF personnel to Iraq*, (2003). www.asahi.com/english/politics/TKY200312100160.html. Diakses 20/11/13.
- Noboru, Yamaguchi. *Redefining the Japan-US Alliance*, (2011). www.nippon.com/en/features/coo204/. Diakses 19/12/2013.
- Spitzer, Kirk. (2013). Japan Looks to Add Offensive Firepower. nation.time.com/2013/06/03/japan-looks-to-add-offensive-capability/.
- Teslik, Lee Hudson. (2006). *Japan and Its Military*. www.cfr.org/japan/japan-its-military/p10439#p5.
- The Asahi Shimbun. (2003). *Koizumi commits SDF personnel to Iraq*. www.asahi.com/english/politics/TKY200312100160.html.